

Transparansi

Transparansi dalam pelaksanaan program di tingkat kelurahan/desa harus dilaksanakan para pelaku, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat BKM, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan perangkat kelurahan/desa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan membuka akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan seperti konsep program, kebijakan & keputusan yang dibuat, kegiatan-kegiatan, dana yang diperoleh, dan siapa saja yang mendapat manfaat dari program dsb.

Untuk semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan/keputusan, penerima bantuan, kegiatan dan keuangan wajib dipublikasikan dan disebarluaskan oleh BKM kepada masyarakat luas serta pihak-pihak terkait lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi di minimum 5 lokasi strategis, laporan bulanan ke RT, RW, Lurah/Kades dan sejenisnya, media warga dan berbagai media yang dimungkinkan

seperti pengumuman di mesjid saat sholat Jumat dan pertemuan-pertemuan warga lainnya.

Transparansi ini harus dilihat oleh para pelaku program sebagai kebutuhan bagi yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa para anggota BKM memang dapat dipercaya warga

Pada sisi lain, BKM juga harus mendorong tumbuhnya kepedulian warga masyarakat untuk peduli terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman dengan tidak saja aktif mengikuti berbagai pertemuan yang diadakan juga mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan dan dana bantuan baik BLM Tridaya maupun BLM Pronangkis-IPM.

Contoh-contoh kegiatan dalam rangka transparansi

- a. Penempelan pengumuman di papan-papan informasi di tempat-tempat yang strategis, minimum di 5 lokasi, dengan ukuran dan bentuk yang mudah dilihat dan dibaca oleh semua warga.